

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD X dan SD Y Bandung

a. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD X Bandung

Pendidikan Inklusif di SD X belum memenuhi elemen dasar pendidikan inklusif. Hal ini dimungkinkan karena pemahaman Kepala Sekolah, Guru Kelas dan GPK terhadap pendidikan inklusif dan ABK masih mengacu pada paradigma pendidikan terpadu. Pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif belum berjalan, pembelajaran ABK dilakukan oleh guru pembimbing khusus (GPK), sehingga ABK baru sebatas “tamu”. Pembinaan kompetensi kepala sekolah dan guru bersifat insidental. *Support System* terhadap SD X baik internal maupun eksternal belum kondusif.

b. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Y Bandung

Pendidikan Inklusif di SD Y Bandung. belum memenuhi elemen dasar pendidikan inklusif. Pemahaman kepala sekolah dan Guru kelas masih menggunakan paradigma pendidikan terpadu. Pelaksanaan pembelajaran individual untuk ABK dilakukan di luar jam pelajaran, yang ditangani oleh tim guru sedangkan sehari-harinya ABK belajar bersama siswa regular (istilah yang ada) sesuai dengan kelasnya masing-masing. ABK yang diterima baru sebatas

anak berkesulitan belajar. Pembelajaran individual tidak dilaksanakan secara benar. Pembinaan kompetensi kepala sekolah dan guru bersifat insidental, *Support System* terhadap SD Y belum kondusif.

2. Kendala-kendala yang dihadapi SD X dan SD Y dalam Pelaksanaan pendidikan Inklusif.

a. Kendala-kendala yang dihadapi SD X Bandung dalam Pelaksanaan pendidikan Inklusif

Kendala yang sangat menghambat proses pelaksanaan pendidikan inklusif di SD X berkaitan dengan persiapan mengelola input siswa, mekanisme asesmen, kurikulum, perumusan program pembelajaran individual yang diperuntukan dengan aneka ragam kebutuhan khusus siswa, sampai proses pembelajaran dan evaluasi. Selain itu juga berkaitan dengan keterbatasan SDM termasuk kurangnya tenaga guru pembimbing khusus (GPK) dan kompetensi guru kelas, dan guru bidang studi dalam hal menangani anak berkebutuhan khusus. Ketergantungan terhadap guru pembimbing khusus (GPK) merupakan kendala utama dan sangat memprihatinkan, padahal pendidikan inklusif sebenarnya tidak harus tergantung pada guru pembimbing khusus (GPK) sebab semestinya yang dominan itu adalah guru kelas





b. Kendala – kendala yang dihadapi SD Y Bandung dalam pelaksanaan

Pendidikan Inklusif

Berdasarkan gambaran data dalam deskripsi data di atas, kendala yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Y, selain tidak adanya tenaga guru pembimbing khusus (GPK), SDM belum mendukung, ruang kelas sangat kurang, terlalu banyaknya jumlah siswa sehingga setiap kelasnya rata – rata menampung 65 siswa serta tidak ada acuan yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, kendala lainnya yaitu anak berkebutuhan khusus tersebar di setiap kelas padahal guru kelas tidak memiliki kompetensi untuk menghadapi ”siswa inklusi” ini.

3. Upaya yang dilakukan SD X dan SD Y dalam mengatasi Kendala

Pelaksanaan pendidikan Inklusif

a. Upaya yang dilakukan SD X Bandung dalam mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan inklusif

Upaya yang dilakukan SD X Bandung, diarahkan pada upaya untuk mengatasi berbagai masalah.. Pihak sekolah sudah memiliki apa yang disebut ”forum rembug”, ini sebagai upaya untuk menyeleksi input siswa, melakukan asesmen sekaligus membuat program yang realistis bagi siswa . Dalam forum ini sekaligus sosialisasi terhadap orang tua sehingga mereka tidak menuntut sekolah dan guru, karena kapasitas anaknya yang berkebutuhan khusus.

b. Upaya yang dilakukan SD Y Bandung dalam mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan inklusif

Kendala-kendala pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Y diupayakan diatasi seperti dengan dibentuknya tim guru, sebagai pengganti guru pembimbing khusus (GPK) yang tidak aktif lagi. Mereka bertugas merumuskan rencana pembelajaran individual, melakukan asesmen dan sekalaigus melaksanakan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang tersebar di setiap kelas. Hal ini sejalan dengan ciri khas pendidikan inklusif yaitu tersedianya program pembelajaran adaptif atau program pembelajaran individual.

B. IMPLIKASI

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap penerapan pendidikan inklusif di SD X dan SD Y Bandung, ini membawa implikasi perlunya reorientasi dan konseptualisasi pendidikan inklusif. Terutama yang berkaitan dengan pedoman dan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini. Mengingat ada kecenderungan miskonsepsi sejak dari pengambil kebijakan sampai implementasinya di lapangan. Ketegasan terhadap pendidikan inklusif harus diambil, sehingga indikatornya dapat diukur.

Implikasi lainnya adalah menyangkut pada fokus perhatian yang semestinya diarahkan pada pembelajaran individual berbasiskan asesmen. Dengan demikian menuntut sebuah mekanisme dan kolaborasi yang jelas dan kontinu dengan titik berat pada peran guru kelas sebagai pelaksana utama program.

Dengan pemikiran ini maka pelaksanaan pendidikan inklusif tidak harus tergantung pada adanya guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah itu, sebab pada tahap pembelajaran guru kelas lebih memiliki peran sentral, sedangkan guru pembimbing khusus (GPK) dan tim lain termasuk orang tua berperan pada tahap asesmen dan program terapi khusus.

Sebagai pelaksana utama program pembelajaran individual dalam konteks pendidikan inklusif, guru kelas perlu didukung dan diberi panduan praktis sekaligus dibantu untuk menjawab permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi kelas heterogen, guru kelas juga hendaknya dibekali dengan program harian dan mingguan yang dirumuskan bersama dalam forum bersama multi disiplinier semacam “ forum rembug’ di SD X. Bandung. Guru juga diberi format evaluasi sesuai dengan konsep kurikulum berdiferensiasi.

C. Rekomendasi

Dengan melihat temuan-temuan penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait yaitu:

a. Pihak Sekolah

Untuk merealisasikan model pembelajaran individual sebagai salah satu elemen dasar pendidikan inklusif, sekolah seyogyanya segera membentuk forum rembug, atau bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, seperti kerjasama dengan pusat sumber, guru pembimbing khusus (GPK) untuk mengasesmen sebagai langkah awal dalam rangka merumuskan program pembelajaran individual termasuk segala hal yang dibutuhkan untuk implementasinya dalam

kelas heterogen oleh guru kelas. sehingga guru kelas bisa secara kreatif memberi pelayanan di kelas terhadap siswa dengan beragam kebutuhannya. Forum ini sekaligus sebagai pembinaan dan sosialisasi pendidikan inklusif kepada semua pihak, khususnya terhadap guru kelas dan orang tua.

b. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan diharapkan dapat membuat kebijakan pembinaan dan pengawasan kepada yang lebih substansial dalam perspektif peningkatan mutu, melalui berbagai aktivitas pembinaan dan pengawasan terhadap elemen–elemen dasar pendidikan inklusif yang menjadi dasar keberhasilan pendidikan inklusif.

Dari aspek pengembangan support syatem, Dinas juga hendaknya memberikan kebijakan yang memungkinkan guru dapat melaksanakan pembelajaran secara lebih kreatif dan fleksibel. Termasuk mensupport buku pedoman pembelajaran praktis yang dapat dikembangkan guru, dan penghargaan terhadap upaya atau kreatifitas guru dalam mengatasi pembelajaran dalam seting pendidikan inklusif.

Dinas secara lebih kongkrit hendaknya melakukan pembinaan secara berkala untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah, Dan mempungsikan SLB sebagai pusat sumber untuk bersama-sama membantu guru kelas dalam menyusun program pembelajaran individual, bentuk evaluasi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul.

